

Fenomena Susilo Bambang Yudonyono Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Politik Masyarakat Indonesia Pasca Pemilu 2004

I Nengah Suastika^{1*}

¹ Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia

*e-mail: nengah.suastika@undiksha.ac.id

Article history: Received 22 July 2020; Accepted 30 August 2020; Available online 31 August 2020

Abstrak

Kesadaran politik adalah kemampuan dan keterampilan yang dimiliki seseorang dalam menentukan pilihan politik dalam mencapai tujuan nasional. Reformasi memberikan kesempatan yang sangat baik kepada semua masyarakat dan tokoh nasional dalam membangun budaya politik yang santun dan beradab. Proses ini pada akhirnya membangun budaya politik yang sportif, transparan, demokratis serta nasionalis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika politik dan pendidikan politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika politik sangat dinamis sesuai dengan aliran partai politik, tokoh politik, penyelenggara pemilu, ketentuan hukum penyelenggaraan pemilu dan kesadaran politik masyarakat. Penelitian juga menunjukkan pendidikan politik yang bersifat informal mampu menjadi ajang masyarakat untuk meningkatkan kesadaran politik dalam memilih. Bahkan, karakteristik tokoh politik menjadi corong yang akan membuat masyarakat mampu meningkatkan keterampilan politiknya. Bertalian dengan itu, tokoh politik semestinya memberikan contoh dan tauladan yang baik bagi masyarakat.

Kata Kunci:

Budaya; Politik;
Pendidikan

Abstract

Political awareness is the ability and skills a person has in making political choices in achieving national goals. Reformasi provides an excellent opportunity for all people and national figures to build a polite and civilized political culture. This process ultimately builds a political culture that is sporty, transparent, democratic and nationalist. This study aims to analyze the dynamics of politics and political education. This study uses a qualitative approach with descriptive analysis. The results of the study show that political dynamics are very dynamic according to the flow of political parties, political figures, election organizers, legal provisions for election administration and public political awareness. Research also shows that informal political education can become a public arena to increase political awareness in voting. In fact, the characteristics of political figures become a mouthpiece that will enable people to improve their political skills. In this connection, political figures should provide good examples and role models for society.

Keywords:

Culture; Politic;
Education

1. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dengan pemerintahan yang bersifat demokratis. Setiap warga negara diberikan kebebasan dalam mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tertulis serta bebas mendirikan perkumpulan sesuai dengan kehendak, asalkan tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai mana termuat dalam pasal 28 UUD 45, yang merupakan pengejawantahan dari demokrasi (Hikam, 2002). Dalam pemerintahan demokrasi hal yang sangat esensial dan menentukan adalah tingkat pendidikan masyarakat. Senada dengan itu Widana (1996) menyampaikan dua poin dasar yang menentukan dalam negara demokrasi yaitu: tingkat pendidikan masyarakat dan pemimpin yang berkualitas. Hal ini cukup beralasan mengingat tinggi rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam menentukan wakilnya dalam pemerintahan akan menentukan jalannya negara dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Demikian pula halnya dengan pigur pemimpin yang ideal akan menentukan sikap politik masyarakat.

Pendidikan politik dalam konteks ini bukanlah pendidikan politik yang bersifat formal dalam sekolah saja, namun lebih jauh dari itu pendidikan dalam konteks ini adalah kesadaran politik masyarakat yang diperoleh dari berbagai sumber baik dari media masa, media elektronik maupun dari tokoh masyarakat. Lasamawan, (2003) mengungkapkan pendidikan politik bukan saja terjadi dengan sengaja setelah dirancang, direncanakan, diformat secara sistematis dan terjadwal (pendidikan formal), namun juga terjadi dengan tanpa disengaja dalam pergaulan sehari-hari (pendidikan non-formal). Bahkan pendidikan politik lebih banyak terjadi dalam proses interaksi dan pergaulan sehari-hari dalam masyarakat. Kondisi seperti ini memungkinkan karena waktu dan keberanian mengungkapkan sikap politik akan lebih banyak terjembatani dalam pergaulan yang bersifat heterogen di masyarakat (Suryo, 2015). Sedangkan pada pendidikan formal dengan waktu dan tempat serta target yang telah ditetapkan secara kaku, pembicaraan politik cenderung kurang berkaitan dengan masalah substansial yang menjadi kebutuhan dan sekaligus permasalahan bagi masyarakat.

Ditinjau dari dimensi pergeseran politik, masyarakat Indonesia saat ini telah mengalami empat kali pergeseran model politik yaitu: politik masa kolonial yang bercirikan nasionalisme, politik masa orde lama dengan ciri pergulatan ideologi, politik masa orde baru dengan ciri intervensi dan militeristik, dan masa politik era reformasi dengan ciri kebebasan. Dari keempat model politik yang pernah mewarnai sistem politik Indonesia tersebut, masyarakat secara tidak langsung telah mendapatkan berbagai warna politik yang dengan nuansa yang berbeda. Pada masa kolonialisme pemimpin yang menjadi idola masyarakat adalah kaum nasionalis, karena kepiawain dan keterampilan politik mereka telah terasah dan dibuktikan dalam mengusir penjajah dari kepulauan nusantara (Widana, 1996).

Sementara pada masa orde lama, masyarakat yang terpecah dalam dua ideologi yang bertentangan yaitu agamis dan komunis serta nasionalis yang menjadi penyeimbang, tetap memposisikan kaum nasionalis sebagai figur yang ideal, sehingga Soekarno tidak mendapatkan hambatan yang berarti ketika meraih posisi satu Indonesia. Bahkan runtuhnya pemerintahan rezim orde lama karena dinilai membelot pada kelompok komunis yang tidak mendapatkan dukungan mutlak masyarakat. Sedangkan pada masa orde baru dengan mandat supersemar, Soeharto diberikan kewenangan dalam memberantas komunis dan menjadi presiden Republik Indonesia yang kedua setelah Soekarno. Sikap netral pemerintahan orde baru ini tidak berlangsung lama, setelah meduduki jabatan pemerintahan bersama dengan kroninya, Soeharto menggunakan angkatan bersenjata sebagai instrumen untuk melegitimasi dan menjustifikasi kekuasaan dan manuver politiknya untuk melemahkan lawan-lawan politiknya (Saleh dan Munif, 2015). Kondisi ini semakin menjauhkan partai politik dari visi dan misinya untuk meningkatkan pemahaman politik masyarakat dan sebagai media strategis pembentukan kader-kader pemimpin bangsa yang berkualitas. Namun dalam keterkekangan selama tiga puluh dua tahun lamanya menumbuhkan kesadaran politik masyarakat dan menghadirkan reformasi sebagai titik puncak bagi jebolnya masa rezim orde baru. Kondisi ini lebih banyak diakibatkan rasa prihatin masyarakat terhadap Megawati yang merupakan putri proklamator bangsa.

Menurut (Nusa, 6 April 2004) dimana seseorang yang dinggap terganjal mapun dimarjinalkan akan mendapatkan dukungan masyarakat.

Pada masa reformasi inilah pintu demokrasi mulai terbuka lebar bagi segenap lapisan masyarakat Indonesia, sejak kepemimpinan ode lama selama tiga puluh dua tahun lamanya. Kemunculan berbagai partai politik yang menyalurkan aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan dan golongan tumbuh dan berkembang dengan subur pada negara Indonesia dengan tanpa ada tekanan dan intimidasi (Lasmawan, 2003). Perkembangan partai politik yang demikian pesat pada masyarakat Indonesia masih belum mampu memberikan pendidikan politik yang berarti bagi seluruh masyarakat. Hal ini masih terlihat dari kekerasan politik yang terjadi pada masyarakat Indonesia masih sangat tinggi. Di sisi lain dalam perjalanan usianya yang kelima, dimana demokrasi dilaksanakan oleh pemerintahan reformasi dengan kabinet gotong royongnya yang dipimpin Megawati Sukarno Putri mulai menyayat kesadaran masyarakat dengan dikeluarkannya Susilo Bambang Yudoyono (SBY) dari kabinet, karena dianggap sebagai saingan dalam pemilihan presiden periode 2004-2009. Di sisi lain tampak bahwa kebebasan Akbar Tajung dari kasus korupsi, disinyalir merupakan rekayasa hukum yang sarat dengan muatan politis. Survei Lembaga Survei Indonesia pada bulan maret (LSI, 2004), menunjukkan bahwa sosok SBY yang dinilai elegan oleh banyak kalangan semakin mendapatkan simpati dimata masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari pengamatan masyarakat bahwa sosok SBY merupakan sosok yang belum tercemar dari penyakit masyarakat yaitu KKN.

Fenomena politik yang demikian rumit tersebut menyebabkan semakin bergulirnya nama SBY dalam berbagai perdebatan politik para elit politik, yang pada dasarnya semakin menguatkan dukungan masyarakat terhadap SBY yang dinilai sengaja “dibuang” oleh rezim Megawati. Bahkan dalam pemilu 5 April 2004 terbukti bahwa partai Demokrat, yang merupakan partai baru yang mengusung sosok SBY sebagai icon politiknya memperoleh dukungan yang cukup mengejutkan dan diluar perkiraan pengamat politik. Nusa, 7 April 2004 menganalisis ada tiga pertimbangan mengapa rakyat lebih memilih Partai Demokrat sebagai pilihan politiknya, yaitu: pertama, agar SBY lolos dalam putaran pemilihan presiden setelah dapat membentuk fraksi di DPR, kedua, karena ketidak puasan terhadap pemerintahan Megawati yang sering menyatakan ingin “membela wong cilik” namun dalam kenyataannya tidak ada realisasinya, ketiga, kebanyakan pemilih muda bukan penganut fanatis suatu partai seperti masa pemilih aliran. Kondisi ini merupakan salah satu bentuk kesadaran politik yang mulai tumbuh dan berkembang dalam masyarakat untuk membangun bangsa dan negara. Selanjutnya pada edisi 9 April 2004, Harian Nusa mengungkapkan melonjaknya partai demokrat dalam perolehan suara pemilu 2004 karena figur SBY, karisma, intelegensi, dan track record yang bagus, sehingga di mata pemilih non-aliran mempunyai nilai labih disamping karena visi dan misi yang dijual adalah untuk mengembalikan stabilitas nasional. Pada bagian lain, di edisi yang sama, Harian Umum Nusa mengedepankan silogisme dengan menyitir kalimat orang bijak berkaitan dengan kondisi tersebut, yaitu “siapa sih yang tidak ingin keamanan kembali pulih setelah terjadinya berbagai peristiwa yang menyebabkan turunnya kunjungan wisata dan menurunnya modal asing yang masuk ke Indonesia”.

Bertalian dengan itu, sangat urgen dilakukan kajian mengenai pengaruh tokoh politik terhadap budaya politik masyarakat, yang pada akhirnya bermuara pada kehidupan pemerintahan yang baik. Disisi lain, partai politik, tokoh politik, penyelenggara pemilu, dasar hukum penyelenggaraan pemilihan umum dan kesadaran politik masyarakat perlu menjadi fokus kajian yang memberikan informasi tentang budaya politik masyarakat (Suastika, et.al, 2019).

2. Metode

Dalam menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan metode kepustakaan yaitu memperoleh data atau bahan-bahan dari berbagai sumber seperti buku, artikel, hasil penelitian, koran, majalah yang berhubungan dengan budaya politik masyarakat secara umum dan dinamika politik masyarakat Indonesia serta supporting factors aktualisasi

Susilo Bambang Yudoyono dalam perkantoran politik nasional dan implikasi fenomena Susilo Bambang Yudoyono terhadap pendidikan politik masyarakat Indonesia (Sugiyono. 2010). Penulisan ini bersifat deskriptif, yaitu penulis menggambarkan secara sistematis, faktual dan aktual mengenai budaya politik masyarakat secara umum dan dinamika politik masyarakat Indonesia serta supporting factors aktualisasi Susilo Bambang Yudoyono dalam perkantoran politik nasional dan implikasi fenomena Susilo Bambang Yudoyono terhadap pendidikan politik masyarakat Indonesia.

3. Hasil dan Pembahasan

Budaya Politik dan Dinamika Politik Masyarakat Indonesia

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang unik dan dinamik serta beragam dalam berbagai hal. Keunikan masyarakat Indonesia terlihat dalam berbagai aktifitas yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Tiap satu kesatuan masyarakat mempunyai ciri has yang berbeda sebagai identitas komunitas dan identitas diri yang membedakan dengan masyarakat yang lain. Budaya komunitas masyarakat akan sangat mempengaruhi sikap dan pola tingkah laku tiap individu yang menjadi pendukung kebudayaan tersebut. Hal ini tidak terlepas dari norma yang dianut oleh tiap kesatuan masyarakat, yang menentukan tiap anggotanya untuk senantiasa menghormati hegemoni masyarakatnya. Biasanya mereka akan enggan untuk mengikuti berbagai perkembangan yang terjadi bila harus meninggalkan dan ditinggalkan oleh hegemoni budaya yang ada dalam masyarakatnya. Keunikan inilah yang biasanya tertanam dalam sikap dan pikiran mereka hingga sulit untuk mendapatkan pengaruh yang bersifat negatif dari luar hegemoni budayanya dan sekaligus sulit untuk mengembangkan trobosan yang bersifat inovatif (Khoirul Saleh dan Achmat Munif, 2015).

Dalam budaya masyarakat Indonesia, orang tua (orang yang dituakan) merupakan figur yang mesti selalu dihormati dan dimintai restu dalam setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Kaum muda akan cenderung menghormati yang lebih tua sebagai bentuk penghormatan terhadap orang yang dituakan atau yang lebih tua. Demikian juga halnya dalam sikap politik masyarakat Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan, atasan merupakan pigur yang mesti dimintai restu dan petunjuk dalam mengambil tindakan, sehingga inovasi dan trobosan yang bersifat konstruktif sulit untuk dibangun oleh bawahan. Masyarakat Indonesia dalam menentukan sikap politik masih banyak diwarnai oleh sikap ketokohan, sehingga apapun yang menjadi pilihan tokoh masyarakat bersangkutan akan dijadikan sebagai pilihan bersama bagi seluruh masyarakatnya. Karakter yang selalu berasal dari restu dan petunjuk orang yang dijadikan tokoh akan membuat lemah tanggung jawab dan rasa inovatif yang ditampilkan oleh setiap masyarakat (bawahan) (Suastika et.al, 2019).

Sikap politik seperti tersebut sangat kentara pada masa pemerintahan rezim orde baru, dimana tindakan setiap pejabat akan selalu minta petunjuk dan restu dari penguasa. Oleh karena itu laporan yang dibuat oleh pejabat bawahan akan selalu menyenangkan penguasa. Sedangkan pada kenyataannya apa yang telah dilaporkan pada atasan tidak sesuai dengan kondisi yang ada dilapangan, sehingga muncul istilah ABS (asal bapak senang). Penguasa tidak memiliki inisiatif terhadap apa yang telah disampaikan bawahnya, sehingga tidak mengecek kebenarannya yang terjadi dilapangan. Keadaan ini terus berlangsung hingga berakhirnya masa pemerintahan orde lama bahkan sebagai salah satu penyebab runtuhnya rezim orde baru (Lasmawan, 2003).

Demikian juga halnya dalam menentukan sikap politik, masyarakat Indonesia banyak terinspirasi oleh filosofi hegemoni budaya yang telah tertanam dalam pikirannya sejak bertahun-tahun lamanya. Masyarakat cenderung akan bersifat primordial dalam menentukan orang yang akan mewakilinya dalam pemerintahan serta dalam menentukan pemimpinnya. Nusa, 7 April 2004, memuat bahwa politik di Indonesia ada dua garis besarnya yaitu, pertama berdasarkan sentimen primordial yang dimaksud dalam hal ini adalah masyarakat menentukan pemimpin dan wakil dalam pemerintahan berdasarkan asal daerah dengan mengabaikan kualitas. Kedua berdasarkan sentimen simpati yaitu keprihatinan terhadap seseorang atau sekelompok orang yang "tertindas" karena tindakan penguasa. Hal ini memang terjadi ketika megawat "tertindas" oleh Golkar dan orde baru sehingga masyarakat pada pemilu 1999 secara

serentak memilih Mega karena simpati Sedangkan kepemimpinan karena sentimen primordial pada rezim orde baru yang menjadi wakil dalam pemerintahan lebih didominasi oleh masyarakat Jawa, karena jumlah penduduk yang paling padat memang terdapat di pulau Jawa (Aryanta, 1997).

Kedua karakter politik masyarakat Indonesia terlihat kental dalam masa pemerintahan Orde lama dan Orde baru. Sedangkan pada masa reformasi yang dicirikan dengan kebebasan sikap politik masyarakat Indonesia mengalami perubahan, dari yang bersifat asal bapak senang (ABS) menjadi disintegritas antar pemimpin untuk mencari popularitas dan simpati masyarakat. Hal ini dicirikan oleh elit politik yang berkuasa, mereka saling “menjelekkkan satu sama lain” yang disebut dengan kritik tak berujung (Herning Suryo, 2015). Keberanian dalam menentukan sikap politik juga sudah mulai kentara, dimana partai penguasa PDI Perjuangan yang sedang berkuasa mengalami perpecahan dalam tubuhnya sendiri menjadi dua partai. Kondisi ini semakin terlihat pada sikap masyarakat dalam pemilihan 2004, dimana masyarakat mengekspresikan aspirasinya kepada partai yang dinilai layak dan sesuai dengan kehendaknya. Bahkan sikap ketokohan oleh kalangan muda dinilai sudah usang dari nuansa politik yang seharusnya di bawa oleh masyarakat reformasi, walaupun masih mewarnai sistem politik Indonesia. Senada dengan yang disampaikan Lasmawan W, (2003) di mana masyarakat telah mulai berani menentukan sikap politik dengan meninggalkan budaya politik yang telah usang dari nilai dan nuansa reformasi sebagaimana yang dicita-citakan masyarakat luas.

Implikasi Fenomena SBY Terhadap Pendidikan Politik Masyarakat

Munculnya sosok Susilo Bambang Yudoyono dalam perkantoran politik nasional, mengundang berbagai pertanyaan sekaligus membawa berbagai dampak terhadap partai politik, elit politik dan masyarakat luas. Tampilan SBY yang berbeda dengan tokoh politik lainnya merupakan salah satu karakter yang sulit dilepaskan dari kemunculan SBY sebagai tokoh politik. Nada bicara yang beraturan, sikap ambisius yang tidak kentara, mengutamakan kepentingan bangsa dan tidak berpikir dan berbicara negataif terhadap lawan politik adalah seperangkat keterampilan yang jarang dimiliki oleh tokoh politik lainnya. Inilah agitasi politik SBY terhadap masyarakat dan para tokoh politik lainnya yang sulit untuk temukan dalam praktek politik selama ini. Kemapanan Susilo Bambang Yudoyono dalam agitasi politik memunculkan rasa keberterimaan dikalangan tokoh politik dari berbagai aliran.

Tampilnya Susilo Bambang Yudoyono sebagai salah satu tokoh politik, membawa perubahan yang cukup berarti bagi semua tokoh politik dan masyarakat Indonesia bahkan peta politik nasional yang selama ini cenderung bersifat riqid. Bahkan beberapa pengamat politik seperti Ibrahim, Wirabhakti dan Wiradarma (Nusa, 25 September 2003) mengungkapkan bahwa peta politik akan tetap sama seperti pada pemilu tahun 1999, walaupun suara PDIP diperkirakan akan cenderung menurun, namun popularitas Megawati masih sulit tertandingi. Asumsi ini didasarkan pada pemikiran bahwa kemampuan masyarakat dalam merespon perubahan politik masih sulit karena cenderung dipicu oleh pendidikan politik yang masih rendah. Selain itu, budaya ketokohan dalam masyarakat Indonesia juga masih kental mewarnai setiap derap langkah masyarakat. Sementara hubungan Megawati dengan beberapa tokoh politik nasional masih tetap terbina dengan baik dengan didukung oleh para pemimpin daerah yang memang sebagian besar berasal dari PDIP. Dengan berbagai alasan itulah pengamat politik diatas berani mengatakan peta politik dan popularitas Megawati saat ini masih sulit untuk ditandingi oleh saingan politik lainnya.

Namun kenyataannya dalam pergulatan politik tahun 2004 dengan tampilnya Susilo Bambang Yudoyono dengan beberapa tokoh politik lainnya seperti Surya Paloh, Aburisal Bakrei, Hasyim Muzadi, Wiranto dan tokoh politik lainnya membawa pergeseran pada peta politik nasional. Pengamat politik mulai memberikan pandangan yang bergeser, yaitu dengan menganggap SBY sebagai saingan dan lawan politik yang cukup kuat untuk Megawati, walaupun dipasangkan dengan Akbar Tanjung (Nusa, 7 April 2004). Hal ini menandakan bahwa telah terjadi pemahaman yang semakin konperhensif dikalangan pengamat politik terhadap pergeseran politik Indonesia. Demikian juga halnya dengan tokoh politik yang semula tidak terlalu menunjukkan sikap antipati dengan Megawati, tetapi dengan mundurnya SBY dari

kabinet gotong royong pemerintahan Megawati, mereka secara serentak menyatakan dukungan terhadap SBY (Nusa, 27 pebruari 2004). Kondisi ini tidak terlepas dari adanya sikap simpati mereka terhadap perlakuan tindakan pemerintah Megawati dan pernyataan Tofik Kemas terhadap SBY, ketika dinyatakan akan dijadikan capres oleh Partai Demokrat.

Disatu sisi dukungan politik terhadap Susila Bambang Yudoyono oleh sejumlah tokoh politik dinilai oleh banyak kalangan sebagai reaksi terhadap marjinalisasi terhadap SBY, serta mulai timbulnya kesadaran politik demokrasi yang sedang dipulihkan di Indonesia. Sedangkan disisi lain hal ini dinyatakan sebagai salah satu strategi politik untuk membenturkan antara kekuatan Megawati dengan SBY, agar lebih memudahkan kelompoknya untuk menuju Indonesia satu. Namun (Bali Post, 8 April 2004) apapun yang ada dibalik dukungan terhadap SBY, tetap memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi penegakan demokrasi yang sejati pada masyarakat Indonesia termasuk pergeseran paradigma politik elit politik.

Sementara itu, di luar perkiraan masyarakat Indonesia yang masih banyak tidak meleak huruf dan jauh dari sentuhan media informasi karena daerahnya yang terpencil dapat merespon kondisi politik yang terjadi di tanah air. Hal ini terlihat dari masuknya berbagai parpol yang sedang berkembang di Indonesia termasuk Partai Denokrat yang baru saja berdiri. Pola pikir masyarakat yang semula bersikap panatik terhadap satu parpol dan akan menganggap perbedaan partai politik sebagai permusuhan dengan seluruh pendukungnya, namun pada Pemilu 2004 masyarakat tidak memandang perbedaan partai politik sebagai permusuhan. Bahkan sudah mulai timbul kesadaran pemikiran bahwa perbedaan warna bendera merupakan kewajaran dalam alam demokrasi seperti Indonesia. Pada tetaran ini terlihat bahwa masyarakat bukan saja sudah dapat memilih namun juga telah dapat memaknai arti dan makna demokrasi sebagai ajang untuk menyalurkan aspirasi dan pendapat untuk menentukan pemimpin bangsa dan negara yang berkualitas, bersih dan berwibawa (Saleh dan Munif, 2015).

Perubahan pada pola pikir masyarakat membawa perubahan terhadap tindakan politik dan respon politiknya. Perubahan tersebut terlihat dengan tenangnya masa kampanye partai politik dan amannya Pemilu 5 April 2004 yang bertujuan memilih legislatif. Kondisi ini tidak terlepas dari adanya kesadaran masyarakat dan keteladanan tokoh politik yang tidak menghendaki perpecahan masyarakat karena permasalahan partai politik, sebagaimana yang selama ini ditampilkan oleh SBY dalam berbagai kesempatan. Tindakan politik masyarakat juga ditunjukkan dalam menentukan pilihan partai politik, yang dikehendaki dan dinilai mampu mewakilinya dalam pemerintahan serta mampu menyalurkan aspirasinya. Sebagai partai baru, Partai Demokrat merupakan partai yang paling menonjol pada Pemilu 2004 dengan perolehan dukungan yang cukup mengejutkan. Menurut Hamza Haz mencuatnya dukungan terhadap Partai Demokrat bukanlah karena kualitas calon legislatifnya, tetapi lebih banyak disebabkan karena popularitas Susilo Bambang Yudoyono dan kematangan politik masyarakat yang menilai SBY sebagai tokoh yang "tertindas" dan layak untuk diberikan support untuk bisa mengikuti putaran pemilihan presiden. Hal ini berarto masyarakat telah terbuka untuk membuka peluang bagi orang yang memiliki kemampuan tanpa memperdulikan asal daerah, suku, agama maupun pernak pernik yang menghiasinya namun lebih menuju pada kualitas.

4. Simpulan dan Saran

Berlandaskan Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik beberapa poin sebagai kesimpulan dari karya tulis ini berkaitan dengan fokus masalahnya yaitu: (a) budaya politik masyarakat Indonesia telah memberikan warna dan alur bagi bergeraknya berbagai komponen politik masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari terjadinya babakan politik dengan cirinya yang khas, mulai dari masa kolonial hingga masa reformasi saat ini. Budaya politik masyarakat Indonesia, juga telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi kemunculan SBY sebagai figus pemimpin dan aktor politik yang sangat populer di Indonesia saat ini, dan (b) phenomena kemunculan dan kepopuleran SBY dengan Partai Demokratnya telah menjadi media pendidikan politik yang sangat efektif bagi masyarakat Indonesia yang secara umum adalah penganut politik aliran. Kekuatan kharisma dan performansi politis SBY telah mampu

“menggeser” ketokohan dan keutuhan aliran politik tertentu di kalangan masyarakat Indonesia, sehingga dilihat dari sudut pendidikan politik, hal ini sangat efektif. Phenomena SBY merupakan “inovasi” dalam pendidikan politik masyarakat Indonesia secara non formal. Artinya, bahwa fenomena SBY dan Partai Demokrat sebagai kendaraan politiknya berimplikasi secara signifikan bagi peningkatan pemahaman dan kesadaran politik masyarakat Indonesia secara luas. Adapun rekomendasi yang dapat diberikan pada 1). pastai politik semestinya memberikan konsistensi program untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, 2) bagi tokoh politik semestinya memberikan contoh dan tauladan yang baik bagi bagi masyarakat, dan 3) penyelenggara pemilu mesti menagakkan ketentuan hukum penyelenggaraan pemilu, sehingga benar-benar demokratis dan yuridis.

Daftar Pustaka

- Ahmad, M. dan Irfan, J. (2016). Pengaruh Kepemimpinan Dan Budaya Politik Terhadap Perilaku Pemilih Towani Tolotang di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Politik Profetik* Volume 04, No. 1 Tahun 2016
- Aryanta, N. (1997). Diktat Mata Kuliah Sistem Politik Indonesia. Singaraja: Jurusan PPKn FPIPS STKIP Negeri Singaraja
- Hikam, A. S. (2002). Politik Aliran dan Keutuhan Islah Secara Politis. Jakarta: Graffiti Press.
- Hening, S. (2015). Budaya Politik Negara Maju dan Negara Berkembang: Suatu Perbandingan. *Jurnal Transformasi* Vol 1. No. 27 Tahun 2015.
- Khoirul, S. dan Achmat, M. (2015). Membangun Karakter Budaya Politik Dalam Berdemokrasi. *Jurnal ADDIN* Vol. 9. No. 2 Agustus 2015.
- Lasmawan, W. (2003). Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar. Singaraja: Jurusan PPKn FPIPS IKIP Negeri Singaraja.
- Lasmawan, W. (2003) Memperkuat Jati Diri Pendidikan Demokrasi Dalam Pembelajaran IPS. (Makalah) Disajikan Dalam Seminar Nasional PIPS Di Universitas Sri Wijaya. Palembang.
- Lembaga Survai Indonesia (LSI). (2004). Presiden Pilihan Masyarakat. Jakarta: LSI.
- Suastika N., et. al., (2019) Folklore and Social Science Learning Model in Elementary School in Bali. *Jurnal Kawistara*, Vol. 9 No. 2, 22 Agustus 2019.
- Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Widana, G. (1996). Diktat Mata Kuliah demokrasi Pancasila. Singaraja: Jurusan PPKn FPIPS STKIP Negeri Singaraja.